

## ABSTRAK

### **AFNI RAUFA ZIKRI : Pengaruh Penerapan Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) Terhadap Kepuasan Pegawai Pada RSUP Dr. M. Djamil Padang**

Latar belakang dilakukan penelitian ini karena tidak semua Rumah Sakit dengan status Badan Layanan Umum mampu membiayai tunjangan dari pendapatannya sendiri sesuai tabel Tunjangan Kinerja Kemenkes. Ada 3 tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui gambaran penerapan kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum pada RSUP Dr. M. Djamil Padang, (2) untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan pegawai RSUP Dr. M. Djamil Padang setelah penerapan kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum (3) untuk mengetahui pengaruh penerapan kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum terhadap tingkat kepuasan pegawai pada RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Penelitian ini telah menggunakan metode Kuantitatif. Berdasarkan teori Colquitt, Lepine, Wesson terdapat salah satu kategori kepuasan yaitu *Pay Satisfaction* yang didasarkan kepada perbandingan antara bayaran yang diinginkan dengan yang mereka terima. Teknik pengambilan sampel pada penelitian adalah menggunakan pengambilan sampel acak berlapis secara proporsional (*stratified proportional random sampling*) dan dalam menentukan besaran sampel dari populasi menggunakan rumus Slovin, dimana yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah pegawai dari RSUP Dr. M. Djamil itu sendiri. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner.

Penelitian menunjukkan bahwa pengukuran tingkat kepuasan setelah penerapan kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum sangat penting karena hasil penelitian menunjukkan setiap 1% kenaikan standar deviasi dari BLU akan menaikkan 24,8% kepuasan pegawai. Sementara itu tingkat kepuasan pegawai setelah penerapan kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum masih tergolong kurang baik. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum belum sepenuhnya dilakukan atas semua aspek-aspek yang terkandung didalamnya terbukti dengan hasil penelitian penerapan kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum yang di terapkan baru 5,2%. Penelitian juga menggambarkan indikator-indikator yang perlu diperbaiki pelaksanaannya yaitu antara lain, pegawai berhak atas gaji pokok dan jaminan lain, indikator pegawai berhak mendapatkan pensiun sesuai kemampuan instansi, indikator pimpinan diperbolehkan belanja melebihi yang ditetapkan pada dokumen RBA, indikator wajib melaporkan jumlah pendapatan operasional dari pengguna layanan yang tidak ditanggung pemerintah, dan yang terakhir indikator pertanggungjawaban belanja melalui Surat Perintah Pengesahan Pertanggungjawaban (SP3B) minimal satu kali dalam tiga bulan. Jadi peningkatan penerapan kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum sangat perlu dilakukan.

**Kata Kunci: Penerapan kebijakan pengelolaan BLU dan Kepuasan Pegawai**